

**CASCADING KINERJA RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2018-2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BONE**

VISI - RPJMD KAB. BONE 2018-2023	Masyarakat Kab. Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)									
MISI - RPJMD KAB. BONE 2018-2023	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)									
TUJUAN - RPJMD KAB. BONE 2018-2023	Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN									
VISI - RENSTRA SATPOL PP 2018-2023	"MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN MANDIRI"					MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN MANDIRI				
MISI - RENSTRA SATPOL PP 2018-2023	MISI I (Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya)					Misi II (Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya c				
TUJUAN RENSTRA	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah (PERDA)		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan		
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Sakip oleh APIP									
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Efektif, Efisien, Ekonomis, dan Berkelanjutan					Meningkatnya Kapabilitas Satuan Polisi Pamong Praja selaku APIP dalam Penyelenggaraan				
INDIKATOR SASARAN	1. % OPD dengan Predikat Implementasi SAKIP minimal B (>60) berdasarkan Hasil Penilaian APIP 2. % Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI 3. % OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) berdasarkan Hasil Penilaian APIP 4. % Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai kewenangan APIP					5. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Standar IACM (Internasional)				
PENANGGUNG JAWAB SASARAN RENSTRA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota					Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Satuan Polisi Pamong Praja					Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keamanan)				
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Rata - Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Satuan Polisi Pamong Praja					Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani dan dituntaskan				
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	SEKRETARIS					BIDANG KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN (TRANTRIB)		BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA)		BIDANG PERLINDUNGAN
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Penegakan Per
SASARAN KEGIATAN	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tercapainya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pene

INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Capaian Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan			
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	SEKRETARIS								Bidang Ketentraman dan Ketertiban (Trantib)	Bidang Pengakan Peraturan Daerah (Perda)	Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimmas)	Bidang Bimbingan Masya (Bimmas)

KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Penegakan Per
SUB KEGIATAN 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjang ASN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dokumentasi Tugas Pimpinan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Sosialisasi Penegakan Peraturan
SASARAN SUB KEGIATAN 1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersusunnya Dokumentasi Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Sosialisasi Penega
INDIKATOR SUB KEGIATAN 1	Jumlah Dokumen Pencanaan yang Tersusun	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bulanan bagi ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pengadaan Bahan Komponen Listrik	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Tersedia	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Memperoleh Jasa Pemeliharaan	Jumlah Dokumentasi Tugas Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Gangguan Trantibun yang dapat diselesaikan	
SUB KEGIATAN 2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Mebel	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Pengawasan Atas Kepa
SASARAN SUB KEGIATAN 2		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Pengadaan Mebel	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Pengawasa
INDIKATOR SUB KEGIATAN 2		Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Mebel	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara		Persentase Gangguan Trantibun yang dapat diselesaikan	
SUB KEGIATAN 3				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Penanganan
SASARAN SUB KEGIATAN 3				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya
INDIKATOR SUB KEGIATAN 3				Jumlah Penyedia Logistik dalam Setahun	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
SUB KEGIATAN 4				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
SASARAN SUB KEGIATAN 4				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan					Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
INDIKATOR SUB KEGIATAN 4				Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan					Jumlah anggota sat linmas	
SUB KEGIATAN 5				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermanfaat Hak Asasi Manusia	

KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Penegakan Per
SASARAN SUB KEGIATAN 5				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan					Tercapainya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	
INDIKATOR SUB KEGIATAN 5				Jumlah Bahan Bacaan					Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM	

KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Penegakan Per
SUB KEGIATAN 6				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
SASARAN SUB KEGIATAN 6				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
INDIKATOR SUB KEGIATAN 6				Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Persentase Penurunan Kriminal	
SUB KEGIATAN 7									Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	
SASARAN SUB KEGIATAN 7									Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	
INDIKATOR SUB KEGIATAN 7									Jumlah pengadaan sarana dan prasarana	
SUB KEGIATAN 8									Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
SASARAN SUB KEGIATAN 8									Tercapainya Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
INDIKATOR SUB KEGIATAN 8									Jumlah dokumen SOP	
SUB KEGIATAN 9									Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	
SASARAN SUB KEGIATAN 9									Tersedianya Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	
INDIKATOR SUB KEGIATAN 9									Jumlah Warga Negara yang terkena dampak penegakan perda dan perkada	
SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN	Kasubag Keuangan	Kasubag Keuangan	Kasuba Umum dan Kepegawaian						(Bidang Bimmas 1. Seksi Kewaspadaan Dini, 2. Pengembangan Kompetensi), (Bidang Trantib 1. Seksi Operasi dan Pengendalian, 2. Ketertiban Umum, dan 3. Kerjasama antar Instansi) (Bidang Perda 1. Seksi Penegakan, 2. Hubungan antar Lembaga dan 3. Pengawas) (Bidang Linmas 1. Seksi Data dan Informasi, 2. Pelatihan dan Mobilisasi dan 3. Bina Potensi Perlindungan Masyarakat	(Bidang Bimmas 1. Seksi Seksi Operasi dan Penge Perda 1. Seksi
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Administrasi Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Administrasi Umum Satuan Polisi Pamong Praja	Barang Milik Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	Jasa Penunjang Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	Barang Milik Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	Protokol dan Komunikasi Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Lembaga dan Pemerintah Desa	Organisasi
STAKEHOLDER TERKAIT	1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. Sappeta Kab. Bone 4. BKAD Kab. Bone 5. DPRD Kab. Bone 6. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan 7. BPKP 8. BPK-RI 9. Kementerian Terkait	1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone 4. BPKP 5. BPK-RI	1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone 4. BPKP 5. BPK-RI	1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone 4. BPKP 5. BPK-RI	1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone 4. BPKP 5. BPK-RI	1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone 4. BPKP 5. BPK-RI	1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone 4. BPKP 5. BPK-RI	1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone 4. BPKP 5. BPK-RI	1. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Dinas Sosial, BPBD, Rumah Sakit, Kantor Cama dan Desa serta Media Cetak	1. Kepolisian, Kejaksaan, Pengad

LAMPIRAN 2

SEJAHTERA	
dalam kemajuan masyarakat	
ertiban dan	Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat
Pemerintahan Daerah	
I Audit Capability Model)	
n Umum	
Jan Keindahan	
Jiselesaikan	
AN MASYARAKAT (LINMAS)	BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT (BINMAS)
raturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	
gakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota

Prak

Bidang Peraturan Daerah
(Perda)

Bidang Ketentraman dan
Ketertiban (Trantib)

Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota

Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

ikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Jumlah Peserta Sosialisasi Penegakan Perda dan Perbup/Perwali

tuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati / Walikota

in Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati / Walikota

Jumlah Kegiatan Pengawasan Peraturan Daerah

atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Persentase pelanggaran perda yang ditangani dan di selesaikan

Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota

Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota

1. Kewaspadaan Dini, 2. Pengembangan Kompetensi), (Bidang Trantib 1. Indalian, 2. Ketertiban Umum, dan 3. Kerjasama antar Instansi) (Bidang / Penegakan, 2. Hubungan antar Lembaga dan 3. Pengawas)

Perangkat Daerah (OPD) / Lembaga dan Pemerintah Desa

Ilai, Dinas Sosial, BPBD, Rumah Sakit, Kantor Cama dan Desa serta Media Xcetak

**CASCADING KINERJA RENSTRA PERUBAHA
INSPEKTORAT DAERAH KAB.**

PEMKAB	Misi : Tujuan : > Indikator Tujuan : Sasaran : > Indikator Sasaran :		
OPD	Tujuan : > Indikator Tujuan : Sasaran 1 : > Indikator Sasaran :		
Pejabat Administrator (Eselon III)			Pejabat Per
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIAT/	
SASARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	SASARAN PR	
INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR k	

.N TAHUN 2018-2023

. BONE

ngawas (Eselon IV)	Pejabat Pelaksana / Fungsional
AN	SUB KEGIATAN
.OGRAM	SASARAN PROGRAM
KINERJA	INDIKATOR KINERJA

CASCADING SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

VISI : Masyarakat Bone yang Mandiri

MISI 3

Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial dasar lainnya

TUJUAN

Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

SASARAN

Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan urusan ketentraman dan ketertiban umum

INDIKATOR

Nilai sapip oleh APIP

PROGRAM DUKUNGAN

Pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan
Bahan Bacaan
Dan Peraturan
Perundang-
Undanga

Rapat-Rapat
Kordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar
Daerah

Pelaksanaan
Administrasi
Perkantoran

PENANGG

Sekretariat

Lintas sektor

POLRI/DIKLAT PPNS
BAGIAN HUKUM
BAGIAN ORGANISASI
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
BAPPEDA
BKPSDM

KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023

ndiri, Berdaya Saing dan Sejahtera

MISI 6

Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyaralat

JUAN

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan peraturan daerah	Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat
---	---	--

ARAN

Menurunnya kasus pelanggaran K3(Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan	Menurunnya jumlah kasus pelanggaran perda	Meningkatkan masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat	Menurunnya kasus penyakit masyarakat	Menurunnya kasus kriminalitas
---	---	---	--	--------------------------------------	-------------------------------

KATOR

Persentase pelanggaran K3 yang diselesaikan	Persentase pelanggaran K3 yang diselesaikan	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)		Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat	Persentase angka kriminilitas yang tertangani
---	---	--	--	--	---

AN KEGIATAN

--	--	--	--	--



VISI - RPJMD KAB. BONE 2018-2023	
MISI - RPJMD KAB. BONE 2018-2023	
TUJUAN - RPJMD KAB. BONE 2018-2023	

TUJUAN RENSTRA	
INDIKATOR TUJUAN	
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya Akuntabilitas secara l
INDIKATOR SASARAN	1. % OPD dengan Predikat Implement 2. % Penyelesaian Tindak Lanjut atas 3. % OPD yang menerapkan SPIP pac 4. % Penanganan Pengaduan Masyar APIP

PENANGGUNG JAWAB SASARAN RENSTRA	
---	--

PROGRAM	Program Penyeleng
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP
INDIKATOR PROGRAM	% Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV

KEGIATAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
SASARAN KEGIATAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)

INDIKATOR KEGIATAN	% Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV

KEGIATAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
SUB KEGIATAN 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
SASARAN SUB KEGIATAN 1	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT
INDIKATOR SUB KEGIATAN 1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT

SUB KEGIATAN 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
SASARAN SUB KEGIATAN 2	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT
INDIKATOR SUB KEGIATAN 2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT
SUB KEGIATAN 3	Reviu Laporan Kinerja
SASARAN SUB KEGIATAN 3	Tersedianya Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT
INDIKATOR SUB KEGIATAN 3	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT
SUB KEGIATAN 4	Reviu Laporan Keuangan

SASARAN SUB KEGIATAN 4	Tersedianya Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT
INDIKATOR SUB KEGIATAN 4	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT
SUB KEGIATAN 5	Pengawasan Desa
SASARAN SUB KEGIATAN 5	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan PKPT
INDIKATOR SUB KEGIATAN 5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan PKPT
SUB KEGIATAN 6	Kerjasama Pengawasan Internal

SASARAN SUB KEGIATAN 6	Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal
INDIKATOR SUB KEGIATAN 6	Jumlah Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal yang Terlaksana
SUB KEGIATAN 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
SASARAN SUB KEGIATAN 7	Tersedianya Laporan Inventarisasi beserta Monev Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal
INDIKATOR SUB KEGIATAN 7	Jumlah Laporan Inventarisasi beserta Monev Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik
SUB KEGIATAN 8	
SASARAN SUB KEGIATAN 8	
INDIKATOR SUB KEGIATAN 8	

SUB KEGIATAN 9
SASARAN SUB KEGIATAN 9
INDIKATOR SUB KEGIATAN 9

SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

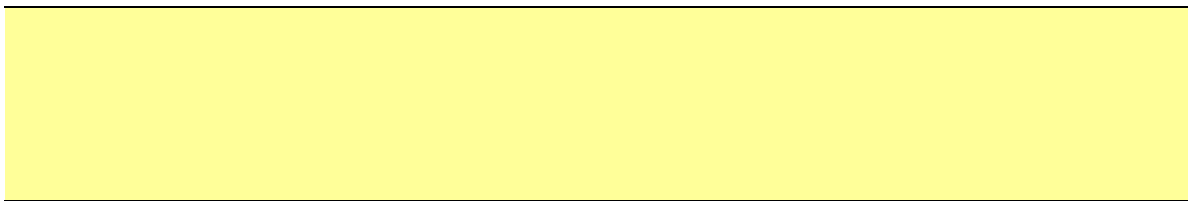
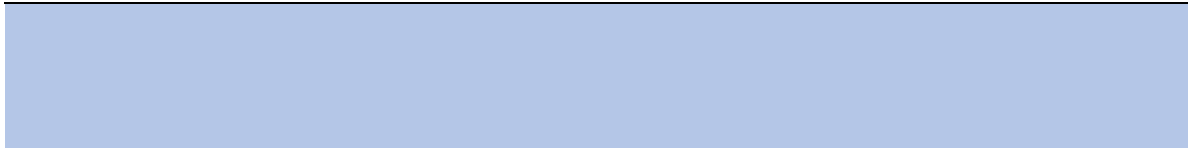
Ka

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN
--

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Desa
--

**STAKEHOLDER
TERKAIT**

- 1. Bupati & Wakil Bupati Bone**
- 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone**
- 3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Kab. Bone**
- 4. Pemerintah Desa**
- 5. DPRD Kab. Bone**
- 6. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan**
- 7. BPKP**
- 8. BPK-RI**
- 9. Kementerian Terkait**
- 10. Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian
& Kejaksaan)**



Indikator Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Ekonomis, dan Berkelanjutan

Indikator Kinerja minimal B (>60) berdasarkan Hasil Penilaian

Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Indikator Keuangan Level 3 (Terdefinisi) berdasarkan Hasil Penilaian APIK
yang dapat ternadap Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa



Pengawasan		Program P
	Meningkatnya Tindak Lanjut atas Pengaduan Masyarakat dan Kasus Tertentu Lainnya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Meningkat Keuangan O /timbulr
	% Kasus Pengaduan Masyarakat dan Kasus Tertentu Lainnya yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	% OPD dan Temuan Ha berpoten Keua
Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan & Investigasi		Urban

SEKRETARIS



Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pendan
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu berdasarkan PKPT	Terlaks dan Asis

% Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu berdasarkan PKPT	% Realisasi dan Asis
Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan & Investigasi	Irban
SEKRETARIS	

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pendan
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Pendampi Pe
Tersedianya Laporan Periodik Hasil Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Ters Pendamping Urusan Pemda
Jumlah Laporan Periodik Hasil Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Lapora Penyelenggar

<p>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</p>	<p>Pendamping Penilai</p>
<p>Tersedianya Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu lainnya sesuai kewenangan APIP</p>	<p>Ters Pendampir Penilaian Refor</p>
<p>Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu lainnya sesuai kewenangan APIP</p>	<p>Jumlah Lapora Verifikasi, da I</p>
	<p>Koordinasi, I Verifikasi Per</p>
	<p>Tersedian Monitoring Pencegaha</p>
	<p>Jumlah Laporar Evaluasi se Pe</p>
	<p>Pendampin Pe</p>

Ters
Pendampi
Penegakan

Jumlah Lapora
dan Verifikasi F

asubag. Analisis, Evaluasi dan Tindak Lanjut

**Laporan Pengaduan Masyarakat, Kasus Gratifikasi/
Whistle Blower/Benturan Kepentingan, serta Kasus
Kepegawaian dan Kasus Tertentu Lainnya terkait
Pelayanan Publik**

Organisasi

1. Masyarakat Umum
2. Bupati & Wakil Bupati Bone
3. Sekretaris Daerah Kab. Bone
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Kab. Bone
5. Pemerintah Desa
6. DPRD Kab. Bone
7. Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian
& Kejaksaan)
8. Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat
9. Ombudsman RI
10. Kementerian Terkait

1. Bupati & Wa
2. Sekretaris D
3. Organisasi F
Kab. Bone
4. Pemerintah
5. Inspektorat
6. BPKP
7. BPK-RI
8. Kementerian
9. Aparat Pene
& Kejaksaan

CASCADING KINERJA RENCANA INSPEKTORAT

Masyarakat Kab. Bone Ya

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Y

Mengembangkan Praktek Penye

Mewujudkan Penyelenggaraan P

1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Per
2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasi
3. Tingkat Maturitas Penyele

ntahan Daerah

APIP

P
a sesuai kewenangan



Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

nya Akuntabilitas Kinerja & PD dan PemDes dari potensi nya Kerugian Keuangan Negara/Daerah	Meningkatnya Elemen Penilaian (Assessment) Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3
n PemDes yang Bersih dari hasil Pemeriksaan APIP yang si/menimbulkan Kerugian ngan Negara/Daerah	% Elemen Penilaian (Assessment) Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan

Bidang Pencegahan & Investigasi - Irban Wil. I s.d. IV



npingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
sananya Pendampingan stensi berdasarkan PKPT	Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Infrastruktur Key Process Area (KPA) Kapabilitas APIP Level 3

Pelaksanaan Pendampingan
Asistensi berdasarkan PKPT

% Key Process Area (KPA) yang
telah memenuhi kelengkapan
Dokumen Infrastruktur Kapabilitas
APIP Level 3

Bidang Pencegahan & Investigasi - Irban Wil. I s.d. IV

Pendampingan dan Asistensi

**Perumusan Kebijakan Teknis di
Bidang Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan**

**Pendampingan dan Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah**

**Perumusan Kebijakan Teknis di
Bidang Pengawasan**

Adiannya Laporan Hasil
Pendampingan/Asistensi Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pemdes berdasarkan PKPT

Terpenuhinya kebijakan
teknis/dokumen infrastruktur
pengawasan pada Key Process Area
(KPA) Kapabilitas APIP Level 3

Jumlah Hasil Pendampingan/Asistensi
Penyelenggaraan Urusan Pemda dan Pemdes
berdasarkan PKPT

Jumlah Key Process Area (KPA)
Elemen Kapabilitas APIP Level 3
dengan kebijakan teknis/dokumen
infrastruktur pengawasan yang
tersusun/terupdate secara lengkap

ngan, Asistensi, Verifikasi, dan ian Reformasi Birokrasi

sedianya Laporan Hasil
ngan/Asistensi, Verifikasi, dan
masi Birokrasi berdasarkan PKPT

n Hasil Pendampingan/Asistensi,
n Penilaian Reformasi Birokrasi
berdasarkan PKPT

Monitoring dan Evaluasi serta ncegahan dan Pemberantasan Korupsi

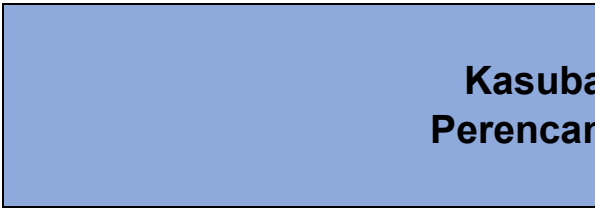
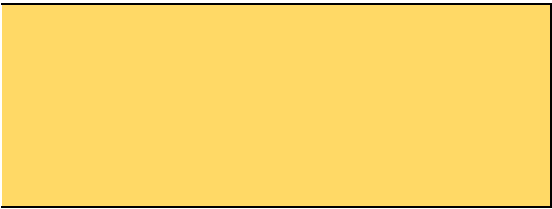
ya Laporan Hasil Koordinasi,
dan Evaluasi serta Verifikasi
n dan Pemberantasan Korupsi

n Hasil Koordinasi, Monitoring dan
rta Verifikasi Pencegahan dan
mberantasan Korupsi

ngan, Asistensi dan Verifikasi enegakan Integritas

sedianya Laporan Hasil
ngan/Asistensi dan Verifikasi
Integritas berdasarkan PKPT

an Hasil Pendampingan/Asistensi
Penegakan Integritas berdasarkan
PKPT



**Wakil Bupati Bone
Daerah Kab. Bone
Perangkat Daerah (OPD)**

**Desa
Provinsi Sulawesi Selatan**

**dan Terkait
Aparat Hukum (KPK, Kepolisian
dan Kejaksaan)**

- 1. Bupati & Wakil Bupati**
- 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone**
- 3. Organisasi Perangkat Daerah Kab. Bone**
- 4. Pemerintah Desa**
- 5. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan**
- 6. BPKP**
- 7. Kementerian Terkait**
- 8. Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian & Kejaksaan)**

STRATEGI PERUBAHAN TAHUN 2018-2023 DI DAERAH KAB. BONE

...ng MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)

...yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan

...lenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas

Pemerintahan Daerah Yang Berkinerja Baik dan

...nerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi
...l Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
...nggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI)

Meningkatnya Kapabilitas Inspektur

5. Hasil Assessment Kapabilitas APIP I

INSPEKTUR DAERAH

[illegible]

di	<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu</p>	<p>Administrasi Milik Daerah dan Perang</p> <p>Tersusunnya Administrasi Barang pada Per</p>
----	--	---	--

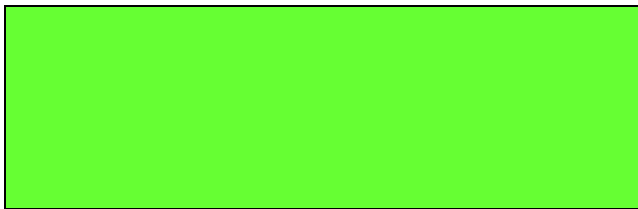
g as	% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	% Penyus Administra Barang pada Per

di	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adminis Milik D Perang
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan Kebutuhan Daerah
a	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Terealisasinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan luran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	Tersedia Perencan Barang Mi Perang
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan luran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	Jumla Perencan Barang Mi Perangka te

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan Milik Daerah
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah	Terealisasinya Pembayaran Jasa / Honorarium per bulan bagi Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Penatausahaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa / Honorarium per bulan bagi Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penatausahaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah yang tersusun	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah yang tersusun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
Terlaksananya Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Evaluasi & Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	
Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Hasil Kinerja Pembangunan Daerah yang diikuti	

ag.
naan

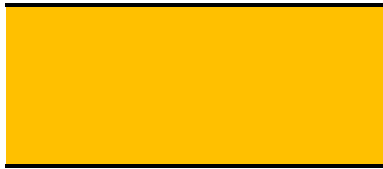


Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Inspektorat Daerah

Pelayanan Administrasi
Keuangan Inspektorat
Daerah

Pelayanan
Barang
pada I
D

	<div>1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. Bappeda Kab. Bone 4. BKAD Kab. Bone 5. DPRD Kab. Bone 6. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan 7. BPKP 8. BPK-RI 9. Kementerian Terkait</div>	<div>1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone 4. BPKP 5. BPK-RI</div>	<div>1. Bupati & 2. Sekretaris Kab. Bone 3. BKAD Kab. 4. BPKP 4. BPK-RI</div>
--	---	--	---



a)

an Nepotisme (KKN)

s dari KKN

Akuntabel

asi SAKIP
i (LKPD)
P)

Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan

Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Interna

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Meningkatnya Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Insp

% Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Insp

SEKRETARIS

**Administrasi Barang
Daerah Pada
Perangkat Daerah**

Terwujudnya Dokumen
Administrasi Pengelolaan
Milik Daerah
Perangkat Daerah

**Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah**

Terwujudnya ASN
Perangkat Daerah yang
Berkinerja Baik dalam
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Jabatan

**Administrasi Umum
Perangkat Daerah**

Terpenuhinya Pelayanan
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

<p> unan Dokumen asi Pengelolaan Milik Daerah angkat Daerah </p>	<p> % ASN Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan </p>	<p> % Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah </p>
---	---	---

SEKRETARIS

<p> strasi Barang daerah Pada gkat Daerah </p>	<p> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah </p>	<p> Administrasi Umum Perangkat Daerah </p>
<p> an Perencanaan n Barang Milik rah SKPD </p>	<p> Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya </p>	<p> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor </p>
<p> nya Dokumen aan Kebutuhan lik Daerah pada gkat Daerah </p>	<p> Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan </p>	<p> Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan sesuai rencana kebutuhan </p>
<p> h Dokumen aan Kebutuhan lik Daerah pada at Daerah yang rsusun </p>	<p> Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan </p>	<p> Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan sesuai rencana kebutuhan </p>

Penyediaan Barang Daerah Pada SKPD	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Laporan Penyediaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Peralatan & Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan
Jumlah Laporan Penyediaan Barang Milik Daerah Perangkat yang tersusun	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Terlaksananya Diklat/Bimtek berdasarkan tugas dan fungsi bagi ASN Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran sesuai rencana kebutuhan
	Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Diklat/Bimtek berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran sesuai rencana kebutuhan per triwulan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

<p>Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait Teknis Pengawasan Internal</p>	<p>Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan</p>
<p>Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang terlaksana terkait Teknis Pengawasan Internal</p>	<p>Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan per bulan</p>
	<p>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p>
	<p>Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan</p>
	<p>Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan</p>
	<p>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p>

Terlaksananya Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan sesuai rencana
kebutuhan

Jumlah Paket Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan sesuai rencana
kebutuhan per bulan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Terlaksananya Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Jumlah Kunjungan Tamu
yang difasilitasi sesuai
estimasi kebutuhan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terselenggaranya
Koordinasi dan Konsultasi
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah

Jumlah Kegiatan Koordinasi
dan Konsultasi yang
dihadiri/dilaksanakan oleh
Aparat Perangkat Daerah

<p>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</p>
--

<p>Terlaksananya Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah</p>

<p>Jumlah Penyediaan Aplikasi IT Pemerintahan</p>

<p>Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Pengelolaan Website Perangkat Daerah</p>
--

<p>Kasubag. Umum, Kepegawaian, dan K</p>

<p>n Administrasi Milik Daerah nspektorat Daerah</p>
--

<p>Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Diklat & Bimtek Bagi Pegawai Inspektorat Daerah</p>

<p>Pelayanan Administrasi Umum Inspektorat Daerah</p>
--

Wakil Bupati
Kab. Bone

1. Bupati & Wakil Bupati
2. Sekretaris Daerah Kab. Bone
3. BKPSDM Kab. Bone
4. BPKP
5. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
6. Lembaga Diklat Resmi bagi ASN

1. Bupati & Wakil Bupati
2. BKAD Kab. Bone
3. DISKOMINFO Kab. Bone
4. BPKP
5. BPK-RI
6. Penyedia Barang/Jasa

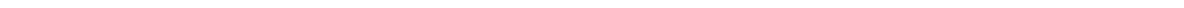
Pemerintahan Daerah

I Audit Capability Model)



Kabupaten/Kota

sektorat Daerah



sektorat Daerah



**Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah**

Terpenuhinya Kebutuhan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Perangkat Daerah

**Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah**

Terpenuhinya Kebutuhan
Jasa Penunjang Urusan
Perangkat Daerah

**Pemeliharaan
Daerah Per
Pemerin**

Terpelihara
Daerah Pe
Perangkat
kon

% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	% Barang Penunjang Urusan Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Daerah Perumahan
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Biaya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan sesuai rencana kebutuhan	Tersedianya Jasa Komunikasi/informasi (telepon, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan rutin/berkala ke
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Komunikasi/informasi (telepon, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan per bulan	Jumlah Pak Bundel Kendaraan Dinas Jabatan rutin/berkala ke

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan J Biaya Pemeli Perizinan K Operasiona
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Lapangan sesuai rencana kebutuhan	Terealisasinya Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	Terlaksanar Kendaraan I secara ruti rencan
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Lapangan sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah Pak Kendaraan I secara ruti rencan
Pengadaan Mebel		Pemelih
Terlaksananya Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai rencana kebutuhan		Terlaksanar Meubeleu rutin/berkal ke
Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai rencana kebutuhan		Jumlah Meuk dipelihara se sesuai ren
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Mesin

Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan
Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan

Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan
Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan
Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai rencana kebutuhan
Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai rencana kebutuhan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Terlaksanar
Rutin Sar
Kelengkapan l
Kantor sesuai

Jumlah Paket
Sarana/Prasa
Pendukung Ge
rencan

Keuangan

**Barang Milik Daerah
Pada Inspektorat
Daerah**

**Jasa Penunjang
Pelayanan Umum
Kantor Inspektorat
Daerah**

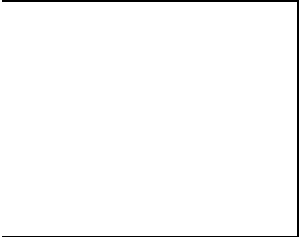
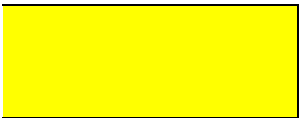
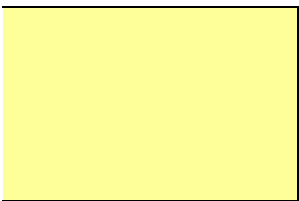
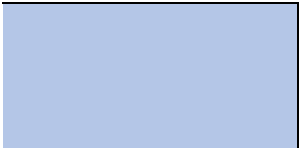
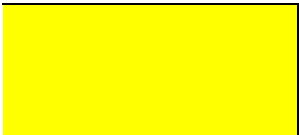
**Barang Milik
Inspektorat**

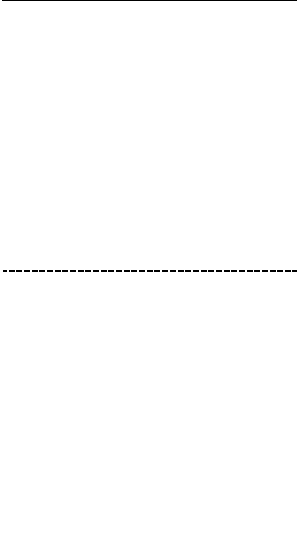
1. Bupati & Wakil Bupati
2. Sekretaris Daerah
Kab. Bone
3. BKAD Kab. Bone
4. UKPBJ Kab. Bone
5. BPKP
6. BPK-RI
7. Penyedia Barang/Jasa

1. Bupati & Wakil Bupati
2. BKAD Kab. Bone
3. UKPBJ Kab. Bone
4. BPKP
5. BPK-RI

1. Bupati & Wakil Bupati
2. Sekretaris Daerah
Kab. Bone
3. BKAD Kab. Bone
4. UKPBJ Kab. Bone
5. BPKP
6. BPK-RI
7. Penyedia Barang/Jasa

AMPIRAN 2

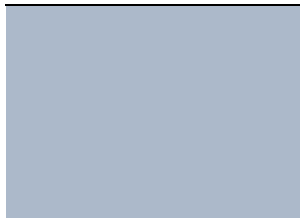




**an Barang Milik
nunjang Urusan
tahan Daerah**

nya Barang Milik
nunjang Urusan
t Daerah dalam
idisi baik

g Milik Daerah
Jrusan Perangkat
lam kondisi baik



**an Barang Milik
nunjang Urusan
tahan Daerah**

**asa Pemeliharaan,
haraan, dan Pajak
Perorangan Dinas
aan Dinas Jabatan**

nya Pemeliharaan
nas Jabatan secara
a sesuai rencana
butuhan

ket Pemeliharaan
nas Jabatan secara
a sesuai rencana
butuhan

**asa Pemeliharaan,
haraan, Pajak, dan
kendaraan Dinas
il atau Lapangan**

nya Pemeliharaan
Dinas Operasional
n/berkala sesuai
a kebutuhan

ket Pemeliharaan
Dinas Operasional
n/berkala sesuai
a kebutuhan

araan Mebel

nya Pemeliharaan
r Kantor secara
a sesuai rencana
butuhan

deleur Kantor yang
ecara rutin/berkala
cana kebutuhan

**an Peralatan dan
n Lainnya**

nya Pemeliharaan
Gedung Kantor secara
sesuai rencana
kebutuhan

atan Gedung Kantor
eliharaan secara
sesuai rencana
kebutuhan

**aan/ Rehabilitasi
tor dan Bangunan
lainnya**

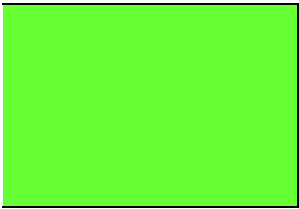
anya Pekerjaan
pemeliharaan Gedung
sesuai rencana kebutuhan

aket Pekerjaan
pemeliharaan Gedung
sesuai rencana kebutuhan

**aan/Rehabilitasi
an Prasarana
gedung Kantor atau
nan Lainnya**

nya Pemeliharaan
ana/Prasarana
Pendukung Gedung
rencana kebutuhan

Pemeliharaan Rutin
arana Kelengkapan
edung Kantor sesuai
a kebutuhan



**lik Daerah Pada
orat Daerah**

Wakil Bupati

s Daerah

e

b. Bone

ab. Bone

Barang/Jasa